

TESIS

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF REGIONAL
GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS WITH
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS A MODERATION
VARIABLE***

**NURHIKMA ASYANAH
A062212017**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF REGIONAL
GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS WITH
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS A MODERATION
VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**NURHIKMA ASYANAH
A062212017**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
202**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

disusun dan diajukan oleh

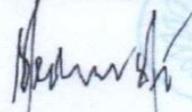
**NURHIKMA ASYANAH
A062212017**

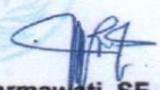
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 26 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

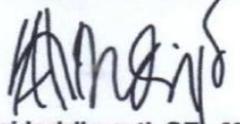
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196509251990022001


Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196705181998022001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi


Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurhikma Asyanah

NIM : A062212017

Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Nurhikma Asyanah

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin ucapan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama penulisan tesis ini, peneliti dengan segala keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan dapat melewati segala hambatan serta masalah berkat bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua tercinta saya ayahanda Syamsul dan ibunda Rusnah, yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan ketulusan hati dan doa yang tak ternilai harganya demi keberhasilan peneliti selama menjalani proses pendidikan. Peneliti juga mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., M.Si., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Darmawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan banyak waktu, pengertian, kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan peneliti. Arahan dan

bimbingan yang sangat bermanfaat dan berarti untuk peneliti dalam menyelesaikan tesis ini mulai dari pemilihan judul, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT. senantiasa akan membalas dengan kebaikan yang melimpah.

5. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, SE., M.M., Ak., CPMA, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si dan Bapak Dr. Yohanis Rura, SE., Ak., M.SA.,CA, selaku tim penguji/penilai yang telah banyak memberikan masukan dan saran mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.
6. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti, dan para staf serta karyawan Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu sehingga urusan administrasi peneliti menjadi lancar.
7. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
8. Terima kasih untuk sahabat-sahabat terkasih yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam setiap keadaan.
9. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi angkatan 20212 terutama kelas B yang selalu memberikan support, masukan dan bantuannya, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT. senantiasa membersamai dan meridhoi perjalanan kita. Aamiin.

Makassar, Februari 2024
Peneliti,

Nurhikma Asyanah

ABSTRAK

NURHIKMA ASYANAH. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Mediaty dan Darmawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Populasi yang digunakan yaitu pegawai pada 55 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 138 pegawai yang terdiri atas tiga orang di setiap OPD yakni kepala dinas atau sekretaris, kasubbag keuangan, dan kasubbag perencanaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas LKPD.

Kata kunci: pengendalian internal, teknologi informasi, sistem akuntansi, kualitas laporan pemerintah daerah, komitmen organisasi



ABSTRACT

NURHIKMA ASYANAH. *Factors Affecting the Quality of Regional Government Financial Reports with Organizational Commitment as a Moderating Variable* (supervised by Mediaty and Darmawati)

This research aims to test and analyze the effect of internal control systems, use of information technology, and regional financial accounting systems on the quality of regional government financial reports (LKPD) with organizational commitment as a moderating variable. This research was a quantitative study using purposive sampling technique. The population used was employees in 55 Regional Apparatus Organizations (OPD) of Polewali Mandar Regency and Majene Regency. The sample was 138 employees consisting of three people in each OPD who were the head of department or secretary, head of finance sub-division, and head of planning sub-division. The data analysis used was multiple regression analysis and moderation. The results of this research show that the internal control system, the use of information technology, and regional financial accounting systems have a positive effect on the quality of LKPD. This shows that organizational commitment can strengthen the effect of the internal control system, the use of information technology, and regional financial accounting systems on the quality of LKPD.

Keywords: internal control, information technology, accounting system, quality of local government financial reports, organizational commitment



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	14
2.1.1 Teori Melayani (<i>Stewardship Theory</i>)	14
2.1.2 Teori kegunaan-keputusan (<i>Decision-Usefulness Theory</i>)...	16
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal.....	17
2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	20
2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	22
2.1.6 Kualitas LKPD.....	27
2.1.7 Komitmen Organisasi	31
2.2 Tinjauan Empiris.....	33
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	41
3.1 Kerangka Konseptual	41
3.2 Hipotesis.....	44
BAB IV METODE PENELITIAN	53
4.1 Desain Penelitian.....	53
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	54
4.4 Jenis dan Sumber Data	57
4.5 Metode Pengumpulan Data	57
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	58
4.7 Instrumen Penelitian.....	60
4.8 Teknik Analisis Data	61
BAB V HASIL PENELITIAN.....	67
5.1 Deskripsi Data	67
5.1.1 Gambaran Umum Responden	67
5.1.2 Karakteristik Responden.....	67
5.2 Uji Instrumen.....	69
5.3 Analisis Statistik Deskriptif	72
5.4 Uji Asumsi Klasik	81
5.5 Uji Hipotesis.....	86
BAB VI PEMBAHASAN	88
6.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas LKPD ..	88
6.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas LKPD.....	91
6.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas LKPD.....	92

6.4	Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas LKPD	94
6.5	Komitmen Organisasi Memoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas LKPD	95
6.6	Komitmen Organisasi Memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas LKPD.....	96
BAB VII PENUTUP		101
7.1	Kesimpulan.....	101
7.2	Implikasi.....	102
7.3	Keterbatasan Penelitian.....	102
7.4	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....		104
LAMPIRAN.....		112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Hasil opini LKPD kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2021.....	3
4. 1 Data Sampel Organisasi Perangkat Daerah Kab. Polewali Mandar	54
4. 2 Data Sampel Organisasi Perangkat Daerah Kab. Majene.....	55
4. 3 Penentuan Kategori Rata-rata Skor Pernyataan Responden	61
5. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	67
5. 2 Karakteristik Responden.....	68
5. 3 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	69
5. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel	72
5. 5 Rekapitulasi Jawaban Responden atas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_1).....	73
5. 6 Rekapitulasi Jawaban Responden atas variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2).....	75
5. 7 Rekapitulasi Jawaban Responden atas variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3).....	76
5. 8 Rekapitulasi Jawaban Responden atas Variabel Komitmen Organisasi (Z). 78	
5. 9 Rekapitulasi Jawaban Responden atas variabel Kualitas LKPD (Y)	79
5. 10 Hasil Uji Autokorelasi	81
5. 11 Hasil Uji Normalitas.....	82
5. 12 Hasil Uji Multikolinearitas	84
5. 13 Hasil Uji t	85
5. 14 Koefisien Determinasi	87
5. 15 Hasil Uji t MRA.....	88
5. 16 Koefisien Determinasi	90
6. 1 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3. 1 Kerangka Pemikiran.....	43
3. 2 Kerangka Konseptual.....	44
5. 1 Hasil Uji Normalitas.....	83
5. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan daerah dalam segala bidang. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sehingga hal ini membuat pemerintah memiliki tanggung jawab kepada publik dalam hal penggunaan anggaran tersebut. Pemerintah daerah dalam hal ini untuk mewujudkan bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan keuangan menjadi faktor penting untuk pemerintah yang wajib diperhatikan dalam penyajian laporan keuangannya dan menggambarkan sebuah media pemerintahan guna mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Aditya & Surjono, 2017). Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) standar normatif yang wajib diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya. Karakter tersebut menjadi syarat normatif yang diperlukan laporan keuangan pemerintah daerah mampu melaksanakan kualitas yang dikehendaki, yaitu mampu dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan sesuai dengan kriteria yang seharusnya, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Fauziyah, 2019).

Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah memberikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi suatu keputusan mengenai alokasi sumber daya (Fauzan, 2020).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah. Presentasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal. Dalam hal ini BPK memberikan 4 (empat) macam opini audit yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD Tahun 2021 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2021. Untuk kabupaten Polman setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perbaikan terhadap laporan keuangan, sehingga BPK memberikan opini WTP selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun 2016- 2021. Meskipun pada tahun 2013-2014 sempat mendapatkan opini WDP. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat meningkatkan kualitas laporannya dengan memanfaatkan sistem pengendalian internalnya, teknologi informasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Tabel 1. 1 Hasil opini LKPD kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2021

No.	Tahun	Opini
1	2013	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2	2014	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
3	2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
6	2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
7	2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
8	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
9	2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: <https://polmankab.go.id/> 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa adanya perubahan opini yang terjadi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2013 dan 2014 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memperoleh opini WDP, pemerintah kabupaten Polewali Mandar menaikkan prestasinya dengan memperoleh opini WTP dari tahun 2015 sampai 2021. Opini WTP diartikan sebagai laporan yang dibuat sesuai dengan standar yang diterapkan dan tidak ada kesalahan material dan disajikan secara wajar.

Meskipun memperoleh opini audit WTP Namun, faktanya masih saja ditemukan permasalahan setiap tahunnya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya temuan terkait LKPD Sulawesi Barat tahun 2020, yang meliputi temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Diantaranya, kerugian negara/daerah dengan jumlah kasus 32 senilai Rp. 3.807.086.557,35, potensi kerugian negara/daerah dengan jumlah kasus 8 senilai Rp. 1.862.115.390,00, kekurangan penerimaan 16 kasus senilai Rp. 1.355.177.43,39, administrasi 28 kasus dengan nilai nihil, temuan kelemahan sistem pengendalian intern dengan jumlah kasus 45 senilai nihil, temuan ketidak ekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 7 kasus senilai Rp. 2.938.046.439,82.

Pencapaian nilai yang telah ditindaklanjuti sampai dengan semester pertama 2021, untuk Kabupaten Majene 8,283, Polman 19,057, Mamasa 27,166, Mamuju Tengah 682, Mamuju 17,513, dan Provinsi Sulbar 63,403. Pencapaian nilai itu sebagai keterangan pengembalian uang negara," pemeriksaan BPK pada semester II tahun 2020 meliputi pemeriksaan kinerja penanganan Covid-19 di Pemprov Sulbar, Kabupaten Polman dan Pasangkayu dan instansi terkait lainnya.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang terjadi baik dalam pelaporan maupun penyajian terhadap LKPD, dan hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan masih belum seluruhnya memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulia, 2018). Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan (Siwambudi, 2017).

Beberapa faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain (Yuliani & Agustini, 2016) : Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan pelimpah tugas secara sistematis ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya *checks and balances*

(Triono dkk, 2020). Fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021 mengungkapkan 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Permasalahan terkait kelemahan SPI sering terjadi karena kurangnya kecermatan penyajian laporan keuangan oleh pejabat pelaksana. Selain itu, kurangnya komitmen mengemban amanah, belum sepenuhnya mengerti ketentuan dan kebijakan yang berlaku, belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kurang koordinasi, belum menindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.

Salah satu tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Fathia dkk, 2020). Sejalan dengan Arista (2018) tujuan sistem pengendalian internal untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan dan data keuangan serta memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Sistem pengendalian internal yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan koperasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik sistem pengendalian internal yang ada maka koperasi simpan pinjam juga akan semakin baik dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Terdapat penelitian sebelumnya Indra & Rani (2020) dari bahwa ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian Alamsyah dkk, (2018), Agustiningtyas dkk, (2020) & Marisa dkk, (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian penelitian Katharina dkk, (2019) menemukan hasil yang berbeda yaitu sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan penatausahaan aset tetap yang ada dalam LKPD dapat disebabkan oleh belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun kota. Keberhasilan teknologi informasi diharapkan mampu menghasilkan informasi nilai aset yang sebenarnya dan dapat meminimalisir kesalahan pencatatan yang terjadi, Sehingga pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan secara maksimal dapat berdampak positif pada kualitas LKPD. Apabila dapat meminimalisir kesalahan pencatatan dan penyajian laporan keuangan dapat ditindak cepat, maka pembuatan laporan keuangan dapat semakin andal dan relevan sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat (Ardianto & Eforis, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Salah satu faktor keberhasilan sehingga sistem informasi akuntansi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia menjadi pengguna dalam penerapan sistem tersebut. Tingkat kompetensi, partisipasi akan sangat didukung guna mewujudkan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (Fachri & Mediaty, 2019), Teknologi informasi dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi informasi jika digunakan secara optimal. Selain itu, dengan menggantikan kendali manual menjadi kendali komputer dapat memudahkan pemerintahan daerah untuk menyusun LKPD.

Penggunaan teknologi informasi yang tepat diharapkan informasi yang dihasilkan akan semakin baik dan akan memberikan berbagai kemudahan pada kegiatan instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas informasi akuntansinya. Teknologi informasi yang telah banyak digunakan oleh instansi pemerintah adalah informasi akuntansi berbasis komputer. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memilih tingkat keakuratan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana dkk, 2014).

Penelitian Herman & Meliana (2020) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan Gusti (2020), dan Puspita & Amelia (2018) menemukan hasil yang berbeda bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik (Mardiasmo, 2016:35). Akuntansi keuangan daerah adalah satu kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur dan prosedur yang dirancang untuk mengolah data/transaksi keuangan pemerintah daerah dalam kerangka APBD melalui pengidentifikasi pengukuran,

pencatatan dan pelaporan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang nantinya akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan.

Penelitian Gratiana dkk, (2022) & Mutmainnah (2020) menunjukkan penelitian bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan Putri Amelia (2018) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peneliti menambahkan variabel moderasi yakni Komitmen Organisasi. Penelitian dengan komitmen organisasi selama ini telah banyak dilakukan pada sektor publik maupun sektor privat. Salah satu penelitian komitmen organisasi pada sektor publik dalam bidang kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Kartini (2022), yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi di kabupaten takalar. Hasil penelitiannya bahwa ketika seorang pegawai mempunyai komitmen yang tinggi terhadap apa yang menjadi pencapaian tujuan organisasinya, maka semakin baik pula outputnya. Komitmen organisasi juga merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong (*reinforce*) antara satu dengan yang lainnya, sehingga karyawan memiliki jiwa untuk membela organisasinya akan berusaha meningkatkan prestasi dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi (Ruslan, 2016).

Alasan lain komitmen organisasi dijadikan variabel moderasi karena terdapat perbedaan penelitian. Penelitian Fatimah (2020) komitmen organisasi secara signifikan memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Cantika dkk, (2021) menyatakan Komitmen organisasi

tidak mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Satriawan & Dewi (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian Putri (2018). Hal ini disebabkan karena jika seorang pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap tujuan organisasinya akan dapat mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan jaringan dengan tepat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian Nasution & Barus (2019) dengan hasil komitmen organisasi secara signifikan memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah penelitian berbeda dengan penelitian Setyaningrum & Atiningsih (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik atau buruknya komitmen organisasi tidak akan mempengaruhi baik atau buruknya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Grand Theory yang menjadi sebuah landasan dalam penelitian ini merupakan teori melayani (*Stewardship Theory*). Dalam *stewardship theory* mengasumsikan bahwa kepuasan dan kesuksesan organisasi memiliki hubungan yang kuat. Teori ini juga menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini dapat diterapkan dalam sektor publik, seperti pemerintah atau seorang pemangku kepentingan tidak akan memenuhi keinginan pribadi namun lebih kepada kepentingan suatu

organisasi yang ditekuni. Hal ini membuat steward (SKPD) dan juga principal (masyarakat) terhindar dari konflik kepentingan. seseorang yang bekerja dalam suatu SKPD diharapkan lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ketika *steward* dan *principal* sudah mampu berjalan berdampingan tanpa adanya konflik kepentingan maka kinerja suatu SKPD tersebut dapat dinilai baik.

Selain teori *Stewardship*, *Decision-Usefulness Theory* menyatakan bahwa pendekatan kegunaan keputusan adalah suatu pendekatan laporan keuangan yang mengakui tanggungjawab individu untuk memprediksi kinerja pemerintah daerah di masa akan datang dan memfokuskan pada penyediaan informasi yang berguna untuk tujuan ini.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar dari penelitian ini, seperti penelitian Fatimah (2020) yang memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu sistem pengendalian internal serta pemanfaatan teknologi informasi, variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah dan variabel moderasi yaitu komitmen organisasi. Perbedaannya terletak pada variabel independent sumber daya manusia yang peneliti ubah menjadi variabel sistem akuntansi keuangan daerah. Alasannya karena masih sedikit penelitian yang menggunakan variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi dan objek penelitian, dimana Fatimah (2020) melakukan penelitian di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut.

1. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah yang dibuat. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian tambahan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi dan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten polewali mandar dalam rangka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi (2013) yang terdiri dari 7 bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, yaitu bab yang menguraikan secara singkat latar belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, yaitu bab yang memuat uraian sistematis tentang landasan teori penelitian ini.

Bab III Kerangka konseptual dan hipotesis, yaitu bab yang berisi mengenai kajian teoritis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya.

Bab IV Metode penelitian, bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisisnya.

Bab V hasil penelitian, bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi tentang data dan temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

Bab VI pembahasan, tujuan pembahasan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Melayani (*Stewardship Theory*)

Stewardship Theory adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak lagi termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih mengarah pada sasaran hasil utama mereka yang digunakan untuk kepentingan organisasi. Kesuksesan di dalam suatu organisasi dapat menggambarkan maksimalisasi kelompok prinsipal dan manajemen, maksimalisasi kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donalson & Davis, 1997).

Stewardship Theory dalam sistem pemerintahan, pemerintah selaku steward bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan principal mereka yaitu masyarakat. Pemerintah melakukan segala perencanaan kegiatan dan pengoperasian kegiatan mereka untuk tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat di sini adalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan para steward guna kepentingan sasaran organisasi pemerintahan. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada principal dalam pelaksanaan tugasnya.

Mardiasmo (2009) Konsep *stewardship* tidak dibebani kewajiban untuk melaporkan dan mengacu pada pengelolaan atas aktivitas secara ekonomis dan efisien, sedangkan *accountability* mewajibkan pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. *Stewardship* (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi yang bergeser dari konsep kepemimpinan dan

manajemen yang mengendalikan (*control*) dan mengarahkan, ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota organisasi, yang merasa organisasi menjadi sesuatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri.

Stewardship Theory memandang bahwa pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah, selaku pihak yang berperan sebagai steward akan bertindak sesuai dengan kesadarannya bagi kepentingan masyarakat, sehingga implikasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah akan menyusun dan menyajikan laporan keuangannya baik dan berkualitas mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, meningkatkan kompetensi aparatur yang bekerja dibidang akuntansi atau aparatur penyusun laporan keuangan, meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, dan pengimplementasian SPI.

Stewardship Theory diasumsikan pemerintah daerah sebagai pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemerintah pusat dan keinginan serta kebutuhan masyarakat selaku principal. Pemerintah daerah akan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang undangan, ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, pemerintah daerah sebagai Steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena pemerintah daerah merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan sesuai keinginan serta kebutuhan masyarakat merupakan pertimbangan yang rasional karena pemerintah daerah lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

2.1.2 Teori kegunaan-keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori normatif. Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan adalah Chambers. Pendekatan model keputusan ditujukan untuk mengetahui informasi apa saja yang diperlukan untuk membuat keputusan. Teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna informasi akuntansi.

Scott (2009) menyatakan bahwa perspektif pelaporan keuangan yang memfokuskan pelaporan informasi yang berguna bagi investor disebut *decision usefulness approach*. Dalam teori kegunaan keputusan (*decision usefulness theory*), informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat (Kiswara 2011). SFAC No. 8 merupakan salah satu dari serangkaian publikasi di FASB untuk akuntansi dan pelaporan keuangan yang mencakup dua bab kerangka konseptual baru yang menggantikan SFAC No. 1, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis, dan SFAC No. 2, tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. SFAC No.8 dimaksudkan untuk menetapkan tujuan-tujuan dan konsep-konsep fundamental yang akan menjadi dasar untuk pengembangan akuntansi keuangan dan pedoman pelaporan agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Teori kegunaan keputusan informasi sangat relevan Karena Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia mengadopsi karakteristik kualitatif dari SFAC No. 2 hanya saja Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 71

tahun 2010 menekankan pada empat prasyarat normatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

2.1.3.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Setiap instansi khususnya instansi pemerintah harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasionalnya. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka instansi tersebut bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi instansi adalah sistem pengendalian internal.

Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang ingin dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Pengendalian Internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang berguna dalam melindungi aset/kekayaan instansi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, kemudian menjamin tersedianya informasi akuntansi instansi yang akurat, sehingga dapat memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan hukum/undang-undang dan kebijakan manajemen sudah dipatuhi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh pegawai di dalam instansi (Hery, 2014). Wahyudi (2018) pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal yaitu proses yang integral

pada kegiatan dan tindakan dimana dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai agar memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari pengendalian internal yang dapat berfungsi dalam melakukan penilaian independen untuk melaksanakan tanggung jawab serta fungsi organisasi pemerintahan.

Pengendalian internal yaitu persiapan organisasi dan cara yang dipakai buat menjaga/melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat serta bisa dipercaya, memperbaiki efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015). Setiap kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan secara terus-menerus supaya tercapainya maksud dari organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal bukan saja mengecek ketelitian angka-angka, namun juga memberikan perhatian struktur organisasi instansi, meningkatkan efisiensi kinerja dan mengarahkan kemajuan/kesuksesan dari suatu kebijakan manajemen. Oleh karena itulah, pengendalian internal harus dipantau dan dinilai agar pengendalian internal tersebut ada manfaatnya, berhasil serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam suatu entitas/organisasi, sehingga adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2016) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut.

1) Menjaga Kekayaan Organisasi

Kekayaan fisik suatu instansi/organisasi bisa dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi

dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan instansi yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2) Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi.

Informasi keuangan yang teliti dan andal dibutuhkan oleh manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk dasar pengambilan keputusan penting banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen. Pengendalian internal dirancang agar memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi yang memberikan menghasilkan informasi keuangan teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan instansi.

3) Mendorong Efisiensi

Agar tercegahnya duplikasi usaha yang tidak diperlukan ataupun pemborosan di segala kegiatan bisnis instansi/organisasi dan agar dicegahnya penggunaan sumberdaya instansi yang tidak efisiensi. Maka dari itulah pengendalian internal ditujukan.

4) Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen

Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur agar tercapainya tujuan-tujuan instansi/organisasi. Pengendalian internal ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Berdasarkan tujuannya pengendalian internal dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif (Mulyadi, 2017).

1. Pengendalian internal akuntansi (*Internal Accounting Control*) adalah bagian dari sistem pengendalian internal, terdiri dari struktur organisasi,

tata cara dan skala yang dikoordinasikan terutama untuk melindungi kekayaan instansi dan mengecek keandalan data akuntansi.

2. Pengendalian internal administratif (*Internal Administrative Control*) adalah pengendalian internal yang terdiri dari struktur organisasi, langkah dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama agar mendorong terciptanya efisiensi kemudian dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.3.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah mengajukan lima indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pengendalian internal. Kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.4.1 Pengertian Teknologi Informasi

Secara umum teknologi informasi adalah sebuah alat yang membantu manusia dalam menyimpan, membuat, mengubah, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya. Indrajit (2011) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan data yang dapat menghasilkan sebuah informasi dalam batas-batas ruang dan waktu.

Darmawan (2012) teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap penyampaian informasi dari pengirim ke penerimanya, sehingga penerima lebih lama menyimpan sebuah informasi dan pengirim lebih luas jangkauan untuk menyebar informasi.

Pemanfaatan teknologi juga berhubungan dengan perilaku yang menggunakan teknologi tersebut untuk menyesuaikan tugas dalam melakukan pekerjaan. Pengukuran berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang meningkatkan kinerja organisasi maupun kinerja individu yang bersangkutan.

2.1.4.2 Fungsi dan Tujuan Teknologi Informasi

Sutarman (2012) mengatakan bahwa terdapat enam fungsi teknologi informasi, diantaranya sebagai berikut.

1) Menangkap (*Capture*)

Sebagai penangkap (*Capture*) mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas dan penerimaan dari *input keyboard, scanner*, dsb.

2) Mengolah (*Processing*) mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk dijadikan suatu informasi pengolahan atau pemrosesan dapat berupa pengolahan data ke bentuk lain (konversi), analisis kondosis (analisis). Perhitungan (kalkulasi), penggabungan (sintetis), segala bentuk data dan informasi.

3) Menghasilkan (*Generating*) menghasilkan atau mengorganisasi informasi dengan bentuk yang berguna. Contohnya: laporan, grafik, tabel, dan sebagainya.

4) Menyimpan (*Store*) merekam atau menyimpan data dan informasi kedalam suatu media untuk keperluan lainnya. Contoh: laporan, grafik, tabel, dan sebagiannya.

5) Mencari kembali (*Retiva*) menelusuri mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data informasi yang telah tersimpan. Contoh : *supplier* yang sudah lunas dan sebagiannya.

- 6) Transmisi (*Transmission*) mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui jaringan komputer contohnya: mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya.

Sutarman (2009) mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah sebagai berikut.

- a. Untuk memecahkan masalah
- b. Untuk membuka kreativitas
- c. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan

Sedangkan menurut Marimin, Hendri & Haryo (2006) mengemukakan: “Tujuan teknologi informasi adalah membantu mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, mengolah data dan akhirnya menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan”.

2.1.4.3 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan menggunakan lima indikator dari Bodnar (2000) yang dikembangkan dari kuesioner Rijalul Fikri (2017). Kelima indikator tersebut yaitu sebagai berikut.

- 1) Keamanan Data
- 2) Waktu
- 3) Ketelitian
- 4) Variasi laporan dan output
- 5) Relevansi

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.5.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Erlina & Rasdianto (2013) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sementara

pengertian sistem akuntansi keuangan daerah terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang bagaimana pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 70 ayat 1 yang berbunyi: "Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi". Sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat 1, menyatakan bahwa: "Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer". Selanjutnya dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Ayat 8, menyatakan bahwa: "Sistem akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah". Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD baik secara manual maupun menggunakan komputer.

2.1.5.2 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Halim (2012) Menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset. Disempurnakan oleh Permendagri menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut.

1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPKD.

3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

5) Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2.1.5.3 Manfaat dan Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), manfaat dilakukannya sistem akuntansi keuangan daerah yaitu dapat menyelenggarakan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, yaitu oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta penggunaan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh pihak eksternal (Mardiasmo, 2008).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima

umum. (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002). Menurut pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebagai prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak eksternal.

2.1.5.4 Indikator SAKD

Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (Permadi 2013) adalah.

- 1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Karena sistem akuntansi pemerintah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- 2) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya. Prosedur Pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.
- 3) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.6.1 Pengertian Kualitas LKPD

Laporan keuangan pemerintah bertujuan dalam pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi seluruh laporan dan penjelasan yang

mengikuti laporan tersebut. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu instansi. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berguna bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan yang berasal dari internal maupun eksternal instansi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang kurangnya setahun sekali.

Laporan keuangan merupakan laporan yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang digunakan oleh pihak manajemen, investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan lainnya dengan tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Mereka menggunakan laporan keuangan agar dapat memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu instansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan instansi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan suatu instansi. Laporan keuangan terdiri dari beberapa informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu instansi, dan informasi tersebut menjadi gambaran kinerja keuangan instansi. Laporan keuangan merupakan suatu ikhtisar keuangan yang menyediakan informasi yang mendasari keputusan ekonomi. Maksudnya adalah adanya hubungan langsung suatu relevansi informasi akuntansi dan alokasi sumber daya dengan efisien.

Pelaporan keuangan pemerintah menyediakan informasi yang berguna untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik. Hal ini telah berlaku dalam SAP No. 24 Tahun 2005 dengan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan administrasi publik yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas.

2.1.6.2 Tujuan LKPD

Pelaporan keuangan pemerintah menurut standar akuntansi pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, atau politik.

Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut (Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.6.3 Indikator Kualitas LKPD

Keempat karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut.

1) Relevan.

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan ketika informasi dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta dapat mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang dapat dikatakan relevan sebagai berikut.

- a. Memiliki manfaat umpan balik yang mana Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu
- b. Memiliki manfaat prediktif yang membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang dengan hasil masa lalu
- c. Informasi disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan

- d. Pengungkapan dalam informasi harus jelas sehingga mampu mencegah terjadinya kekeliruan dalam penggunaan informasi

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan tahunan bebas dari pengetahuan yang menyesatkan atau kesalahan material, benar dalam segala hal dan dapat diverifikasi. Informasi tersebut mungkin relevan, tetapi penggunaannya dapat menyesatkan jika sifat atau representasinya tidak dapat diandalkan.

- a. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.
- b. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh
- c. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang ada dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya ataupun dengan entitas laporan keuangan yang lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang telah tersaji dalam laporan keuangan dapat memberikan pemahaman yang mudah oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.7 Komitmen Organisasi

2.1.7.1 Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Samsuddin (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah janji (perjanjian/kontrak) untuk melakukan sesuatu. Janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang.

Utaminingsih (2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu terkait dengan keterlibatannya sebagai anggota organisasi, hal ini menunjukkan sebagai konstruk yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, yang menarik untuk dikaji sebagaimana konsep kepuasan kerja keterlibatan kerja, perkembangan karier, komitmen saat ini, dan intensitas keluar masuknya karyawan dalam suatu organisasi.

Priansa (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan identifikasi pegawai terhadap persetujuan untuk mencapai misi unit atau misi organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi yakni sikap atau keaslian watak seorang karyawan atau sikap kesungguhan seorang karyawan terhadap sebuah organisasi, dan bertujuan agar bisa dipertahankan di organisasi tersebut.

2.1.7.2 Faktor yang mempengaruhi Komitmen Organisasi

Darmadi (2018) mengemukakan faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu sebagai berikut.

- 1) Faktor Personal, misalnya Usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, dll. Termasuk faktor kepribadian antara

lain etos kerja, kesediaan untuk memberi keuntungan pada organisasi dari apa yang dikerjakan dan keinginan untuk mengaktualisasikan diri dan pengembangan karir.

- 2) Faktor Organisasional, meliputi kepekaan terhadap loyalitas organisasi, keamanan kerja dan insentif ekonomi.
- 3) Faktor Relasional, meliputi kepercayaan dari atasan, komunikasi dengan atasan dan rekan kerja serta umpan balik positif dari pimpinan atau klien.

Priansa (2018) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional sebagai berikut.

- 1) Keadilan dan Kepuasan Kerja, hal yang paling mempengaruhi loyalitas pegawai adalah pengalaman kerja positif dan adil. Komitmen organisasional akan sulit dicapai apabila pegawai menghadapi beban kerja yang meningkat namun justru keuntungan yang diperoleh organisasi hanya dinikmati oleh pimpinan atau manajer tingkat atas saja.
- 2) Keamanan Kerja, pegawai membutuhkan hubungan kerja yang saling timbal balik dengan organisasi. Keamanan kerja harus diperhatikan untuk memelihara hubungan dimana pegawai percaya usaha mereka akan dihargai oleh organisasi, pimpinan, maupun manajer organisasi.
- 3) Pemahaman organisasi, merupakan identifikasi secara personal terhadap organisasi. Sikap ini akan menguat ketika pegawai memiliki pemahaman yang kuat tentang organisasi.
- 4) Keterlibatan pegawai, pegawai merasa menjadi bagian dari organisasi ketika mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan organisasi.
- 5) Kepercayaan pegawai, kepercayaan juga merupakan sebuah aktivitas timbal balik. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus saling mempercayai.

2.1.7.3 Manfaat Komitmen Organisasi

Juniarari (2011) mengatakan bahwa manfaat dengan adanya komitmen dalam organisasi adalah sebagai berikut.

- 1) Para pekerja yang akan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam sebuah organisasi.
- 2) Memiliki keinginan yang kuat untuk tetap bekerja pada organisasi dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan.
- 3) Sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka, karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi

2.1.7.4 Indikator Komitmen Organisasi

Indikator komitmen organisasi dalam Krisnawati dan Suartana (2017), sebagai berikut.

- 1) Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.
- 2) Kemauan yang besar untuk berusaha bagi organisasi.
- 3) Kepercayaan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian Jauhari & Hazisma (2021) yang menguji Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan standar akuntansi pemerintah diterapkan secara bersama-sama dengan sistem akuntansi keuangan daerah mampu meningkatkan kualitas LKPD, walaupun sistem pengendalian internal pemerintah ternyata belum mampu memediasi

pengaruh standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas LKPD.

Penelitian Sambuaka dkk, (2020) yang menguji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan pengendalian berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan pengendalian dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian Fathia dkk, (2020) yang menguji Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Komitmen organisasi hanya berhasil memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Setyaningrum & Atiningsih (2019) yang menguji Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Salatiga. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini membuktikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Dariana & Oktavia (2018) yang menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Penelitian Fauziyah (2019) yang menguji Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang.

Penelitian Andrianto & Rahmawati (2018) yang menguji Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD, Komitmen Organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh Kapasitas SDM terhadap Kualitas LKPD, Komitmen Organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Kualitas LKPD, Komitmen Organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh SPIP terhadap Kualitas LKPD.

Penelitian Ade dkk, (2020) yang menguji Kontribusi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Dengan Subyektif Norma Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Pujanira (2017) yang menguji Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan penerapan

standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Bagian Pemerintah Daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan yang berkualitas sesuai karakteristik kualitatif laporan keuangan (Peraturan Pemerintah, No. 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berguna bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan yang berasal dari internal maupun eksternal suatu instansi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang kurangnya setahun sekali. Laporan keuangan merupakan laporan yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang digunakan oleh pihak manajemen, investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan lainnya dengan tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Mereka menggunakan laporan keuangan agar dapat memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.

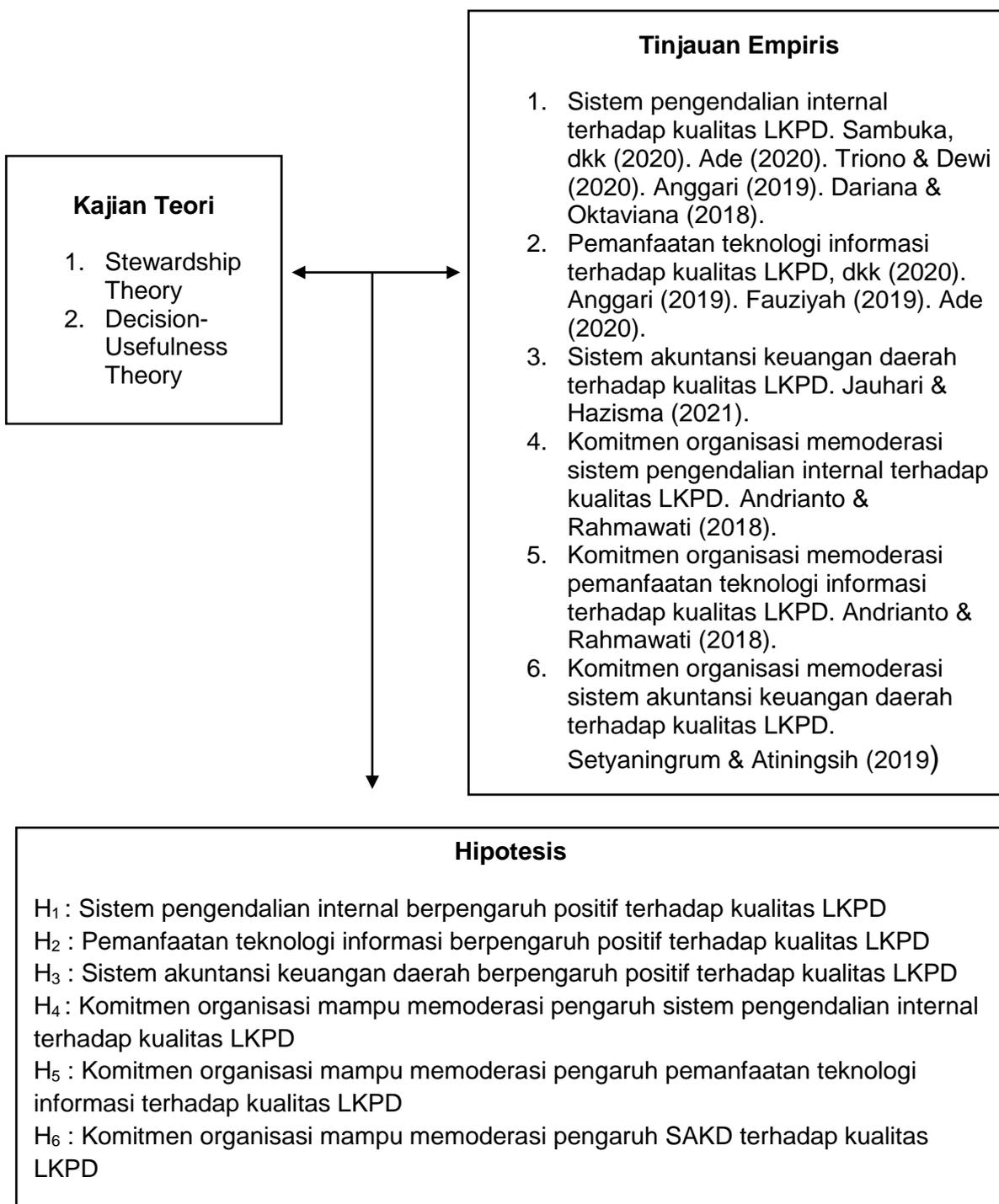
Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang ingin dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. dengan demikian pengertian sistem pengendalian internal tersebut diatas adalah berlaku baik dalam instansi yang mengelola

informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer (Mulyadi, 2017).

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan data yang dapat menghasilkan sebuah informasi dalam batas-batas ruang dan waktu, Indrajit (2011). Pemanfaatan teknologi juga berhubungan dengan perilaku yang menggunakan teknologi tersebut untuk menyesuaikan tugas dalam melakukan pekerjaan. Pengukuran berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang meningkatkan kinerja organisasi maupun kinerja individu yang bersangkutan.

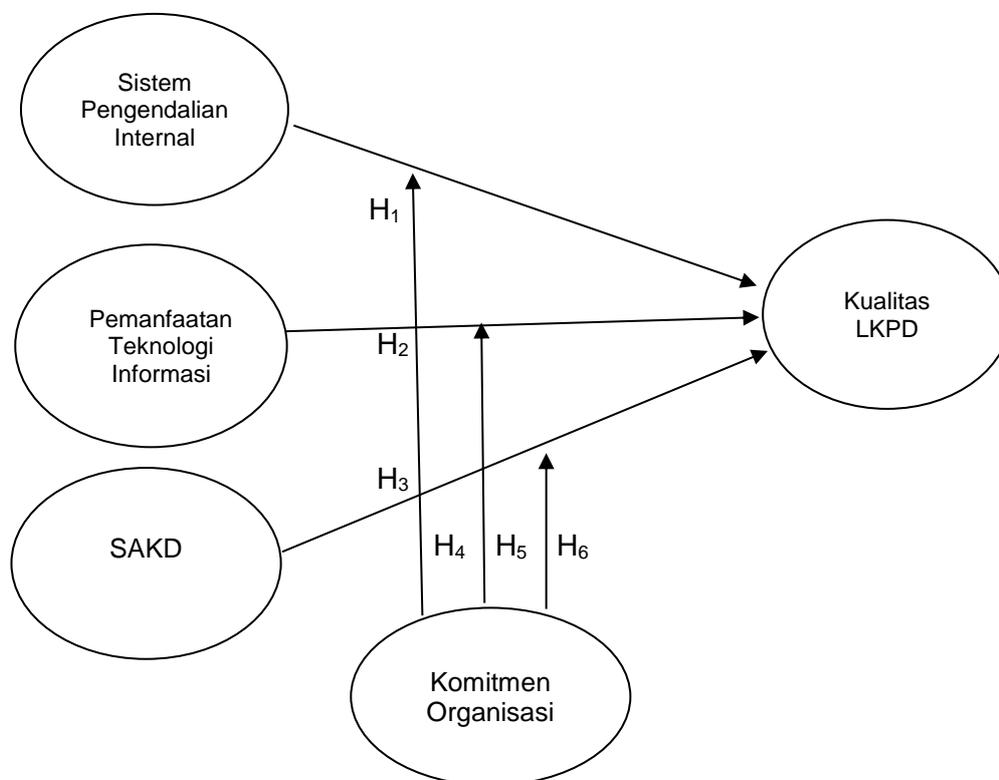
Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sementara pengertian sistem akuntansi keuangan daerah terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan, Erlina & Rasdianto (2013). Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Pengertian mengenai komitmen organisasi yakni adalah janji (perjanjian/kontrak) untuk melakukan sesuatu. Janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang Syamsuddin (2018) Kerangka

pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan konsep, teori dan penelitian empiris yang telah ditemukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah diuraikan sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut.



Gambar 3. 2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efisien dan efektif.

Stewardship Theory dalam sistem pemerintahan, pemerintah selaku steward bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan principal mereka yaitu masyarakat. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut pemerintah mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk dapat memberikan

kontribusi dalam organisasi. Tetapi, pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah penyelewengan dalam proses pengimplementasiannya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dapat dilakukan dengan mengefektifkan pengendalian internal sebagai sistem yang digunakan untuk memberi keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan penerapan Sistem pengendalian internal pemerintah yang dapat memastikan seluruh penyelenggaraan kegiatan dapat terlaksana dengan efektif. Sistem pengendalian internal pemerintah yang telah ditetapkan, tetapi belum efektif, berakibat pada kualitas pelaporan keuangan yang tidak memuaskan. Selain itu, sistem pengendalian internal pemerintah yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian Gusti, dkk (2017), Nurul, dkk (2020) dan Faezal, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Teknologi informasi sangat dibutuhkan organisasi untuk membantu mencapai tujuannya. Teknologi informasi

dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Pengaruh teknologi dalam proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara komponen-komponen masyarakat itu sendiri jelas lebih efektif dan dapat dirasakan secara langsung oleh pemerintah yang mau tidak mau harus siap memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi tersebut. Sehingga dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini tidak hanya pada organisasi bisnis namun juga harus dapat dimanfaatkan oleh organisasi pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempermudah dan mempercepat proses kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang optimal dan andal ditunjang dengan pemanfaatan TI yang baik akan berdampak pada laporan yang mudah disusun, diproses, disimpan untuk kualitas hasil data yang akurat, relevan dan tepat waktu, serta mudah diinformasikan dan diakses oleh seluruh masyarakat (Putra, R., Azlina., Safitri, 2017). Pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa hasil penelitian Elvin Andrianto (2017) Setyaningrum dan Atiningsih (2019) dan Kartini, dkk (2022) yang mengatakan pemanfaatan TI mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Seiring dengan semakin kompleks transaksi keuangan daerah dan perubahan regulasi basis akuntansi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Jika laporan keuangan dipertanggungjawabkan dengan baik artinya memberikan informasi keuangan secara akurat dan lengkap sesuai dengan pedoman, hingga dalam bentuk dan waktu yang tepat, maka kualitas dari laporan keuangan akan memperoleh karakteristik yang telah ditetapkan, sebab sistem akuntansi merupakan satu kesatuan yang jika tidak diimplementasikan maka akan sulit memperoleh laporan keuangan yang berkualitas (Indrayani & Widiastuti, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Andelina & hariyanto (2017), & Fauziyah (2019) mengatakan bahwa

sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.4 Pengaruh Moderasi Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Antara Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Robbins & Judge (2016) mengatakan bahwa komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi yang dicirikan oleh penerimaan nilai dan tujuan organisasi, kesediaan berusaha demi organisasi, dan keinginan mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Stewardship theory menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan *Stewardship theory* lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dalam pengelolaan aset daerah, Pemerintah selaku steward menginginkan penyelenggaraan yang baik atas pengelolaan keuangan dan aset, sehingga dapat dipergunakan untuk melayani masyarakat. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan, maka pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan aset kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Dukungan sistem pengendalian intern yang memadai, melatar

belakangi tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya karena ditunjang oleh sumber daya manusia yang akan menggunakan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi karena telah memiliki komitmen.

Penelitian Alminanda & Marfuah (2018) menunjukkan komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, memiliki persepsi yang positif dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.5 Pengaruh Moderasi Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Antara Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan adanya Teknologi informasi yang lebih memenuhi, diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam berbagai proses dalam penyajian laporan keuangan, baik dari segi efisiensi waktu, tingkat keakuratan dan lain sebagainya. Ketika setiap pegawai tersebut berkomitmen pada tugasnya, maka kesadaran untuk bertanggungjawab pada instansi tersebut akan dilaksanakan Edlin (2018). Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi haruslah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan atau organisasi dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang baik secara *hardware* maupun *software* (Triyanto, 2019). Pegawai dengan tingkat komitmen yang tinggi pada organisasi memberikan kemampuan di dalam memanfaatkan teknologi yang ada.

Proses dalam pengolahan data akan terhindar dari kesalahan input serta akan terselesaikan secara tepat waktu.

Teori kegunaan keputusan menjelaskan bahwa suatu laporan keuangan bermanfaat jika laporan tersebut pengaruh terhadap keputusan pengguna. Oleh sebab itu, salah satu faktor pemicu keputusan pengguna dari laporan keuangan adalah berdasarkan penggunaan teknologi informasi pada instansi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan, maka akan meningkatkan serta mempercepat proses transaksi dan pengolahan data lainnya, keakuratan dalam perhitungan, serta mempermudah penyusunan laporan keuangan sehingga lebih cepat dan tepat. Jadi, semakin optimal penerapan teknologi informasi akan berpengaruh pada keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian Andelina & Hariyanto (2017) menunjukkan komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti, bahwa jika setiap pegawai memiliki komitmen yang tinggi di dalam organisasi, maka pegawai tersebut akan menggunakan teknologi yang ada secara maksimal sehingga dapat memberikan iuran output yang sesuai dengan harapan. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.6 Pengaruh Moderasi Komitmen Organisasi terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori kegunaan keputusan (*Decision-Usefulness Theory*), informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting*

Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat (Kiswara 2011). SFAC No.2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam SFAC No 2, hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah, Loyalitas pegawai yang tinggi pada suatu organisasi pekerjaan akan membawa dampak yang baik bagi suatu organisasi dalam pencapaian tujuan, serta berpengaruh baik untuk memotivasi rekan kerja dalam organisasi

Sistem akuntansi keuangan daerah lebih kepada seperangkat prosedur yang mengatur segala proses dan kegiatan yang ada pada pencatatan keuangan daerah, sehingga sistem akuntansi keuangan daerah dapat mengatur segala aktivitas dalam pencatatan keuangan daerah, mulai dari proses pembuatan, pencatatan, pelaporan, hingga pada pertanggungjawaban, sehingga sistem akuntansi keuangan daerah dapat mengatur bagaimana suatu keuangan daerah menjadi lebih terstruktur, terarah, berkualitas dan dapat dipahami dengan mudah serta mampu dipertanggungjawabkan. Hal itu dapat berlaku apabila setiap aparat yang melaksanakannya memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya yang memiliki tujuan untuk menciptakan kinerja organisasi yang baik dimulai dari kinerja individu dan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Hasil penelitian Aditya (2017) menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin bagus komitmen organisasi dalam sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin bagus hasil laporan keuangan yang disusun. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H6 : Komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.